

LITERATURE REVIEW ISU ETIKA DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM: TANTANGAN, DISKURSUS KONTEMPORER, DAN RELEVANSI GLOBAL

Rahayu Lestari¹ Shera Nabila Luvianingtias² Jamal Fakhri³ Koderi⁴ Junaida⁵

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung¹²³⁴⁵

rahayulestar08@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif isu-isu etika dalam Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dengan menggunakan pendekatan *literature review*. Fokus kajian terletak pada tantangan praktik tata kelola pendidikan, seperti integritas kepemimpinan, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, serta relevansinya dalam konteks global. Metode *literature review* digunakan untuk mensintesis temuan dari studi nasional dan internasional, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip etika Islam dan praktik manajerial di lembaga pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dinamika globalisasi, digitalisasi, dan kompetisi antar lembaga memunculkan dilema etika yang menuntut pengelolaan berbasis nilai-nilai Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, orientasi pasar, dan tekanan akreditasi internasional. Temuan penelitian menegaskan bahwa MPI memiliki potensi strategis sebagai model *ethical governance* alternatif dalam sistem pendidikan global, dengan menyeimbangkan efisiensi manajerial dan spiritualitas keislaman. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga memberikan arah pengembangan manajemen pendidikan Islam yang profesional, akuntabel, adaptif, dan bermoral universal.

Kata Kunci: Isu etika, Tantangan kontemporer, Diskursus, Relevansi global

ABSTRACT

This study aims to comprehensively examine ethical issues in Islamic Education Management (IEM) using a literature review approach. The focus of the study is on governance challenges in educational institutions, including leadership integrity, transparency, justice, and accountability, as well as their relevance in a global context. The literature review method is employed to synthesize findings from national and international studies, identifying gaps between Islamic ethical principles and managerial practices in educational institutions. The findings indicate that globalization, digitalization, and competition among institutions have generated ethical dilemmas that require IEM to adopt value-based management aligned with Islamic principles and responsive to contemporary changes. These gaps are primarily caused by weak oversight systems, market-oriented pressures, and international accreditation demands. The study highlights IEM's potential as a strategic model of ethical governance in global education systems by balancing managerial efficiency with Islamic spirituality. Consequently, this research contributes to the academic discourse and provides guidance for developing Islamic education management that is professional, accountable, adaptive, and morally grounded.

Keywords: Ethical issues, Contemporary challenges, Discourse, Global relevance

PENDAHULUAN

Manajemen Pendidikan Islam berperan sebagai kerangka strategis yang memandu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendidikan agar lembaga Islam dapat beroperasi secara profesional dan berkelanjutan. Dengan perencanaan strategis, sistem

pengelolaan organisasi, serta pembinaan kapasitas tenaga pendidik, MPI membantu lembaga merumuskan visi dan misi yang jelas, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta merancang mekanisme pertanggungjawaban operasional sesuai prinsip pendidikan Islam. (Syahid et al., 2022, hlm. 88-90.) Berdasarkan studi empiris dan tinjauan literatur, penerapan model manajemen yang terstruktur (perencanaan strategis, penjaminan mutu, dan profesionalisasi guru) dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta meningkatkan kredibilitas lembaga di kalangan masyarakat. (Anggini, Khaudli, 2024, hlm. 41-43.).

MPI tidak hanya berupa prosedur administratif biasa, tetapi juga menjadi cara untuk menerapkan nilai-nilai etika Islam dalam kegiatan memimpin, mengambil keputusan, serta hubungan dengan pihak-pihak terkait. Kepemimpinan yang bersifat etis, yang menekankan contoh yang baik, adil, dan jujur, ternyata membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan kepercayaan guru, murid, dan orang tua, serta mengurangi risiko tindakan tidak bertanggung jawab atau korupsi. (Anggini, Khaudli, 2024, hlm. 45-47.) Penelitian yang dilakukan di madrasah dan pesantren menunjukkan bahwa perhatian yang sungguh-sungguh terhadap etika manajemen memberikan dampak positif pada budaya sekolah dan hasil pendidikan karakter. (Alabdulhadi & Alkandari, 2024,hlm. 112-114.) MPI juga berperan dalam memastikan akuntabilitas keuangan dan transparansi pengelolaan sumber daya, dua hal penting yang diperlukan untuk mempertahankan keberlanjutan lembaga pendidikan Islam, terutama di masa kini yang lebih terbuka dan memerlukan standar internasional. Melalui kajian literatur sistematis terhadap pondok pesantren dan survei di berbagai institusi pendidikan Islam, terlihat bahwa diperlukan beberapa mekanisme seperti pelaporan, audit internal maupun eksternal, serta melibatkan pihak terkait (stakeholder engagement) agar kebijakan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan praktik tata kelola yang baik. Selain itu, penerapan tata kelola yang transparan juga meningkatkan reputasi lembaga secara global dan memudahkan kerja sama serta akses pendanaan internasional. (Nurkhin et al., 2024, hlm.29-32;).

Banyak penelitian menunjukkan betapa pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai etika dan kepemimpinan berdasarkan Islam dalam manajemen perusahaan (MPI). (Nurkhin et al., 2024, hlm.29-32.) Namun, hasil penelitian empiris menunjukkan adanya perbedaan nyata antara penerapan retorika etis dan praktik nyata di lapangan. Pada beberapa kasus, kebijakan etika dan pedoman manajemen formal sudah tersedia, tetapi implementasinya masih lemah karena keterbatasan kemampuan manajerial, adanya ketidaksetujuan dari budaya organisasi, serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif.(Akhyar, 2024, hlm.54-56.). Akibatnya, klaim-klaim lembaga tentang "nilai Islami" sering hanya bersifat simbolik dan belum benar-benar terwujud dalam praktik pengambilan keputusan yang transparan dan bertanggung jawab. (Novia & Siti Aimah, 2024, hlm. 56-58). Kritik lain yang sering muncul dalam penelitian adalah banyak lembaga MPI masih menggunakan sistem akuntabilitas yang formal dan terpisah, seperti laporan keuangan internal tanpa audit mandiri atau partisipasi masyarakat yang rendah, sehingga memberi ruang bagi penyalahgunaan sumber daya. Penelitian kualitatif dan kuantitatif di madrasah menunjukkan hubungan antara mekanisme pengawasan yang lemah dengan kinerja manajerial yang rendah; penelitian ini menyarankan peningkatan prosedur audit,

melibatkan pihak eksternal, serta meningkatkan kemampuan manajerial agar celah tersebut ditutup. (Hajarana et al., 2025,hlm. 71-74) Tanpa perubahan prosedural seperti itu, upaya untuk membangun tata kelola yang profesional dan akuntabel akan terhambat, meskipun ada niat normatif yang kuat. Selain itu, literatur terkini menyoroti bagaimana tekanan akibat globalisasi, seperti standar internasional, persaingan, serta finansialisasi dalam bidang pendidikan, bersama dengan percepatan proses digitalisasi, telah menciptakan dilema etika baru yang belum sepenuhnya diatasi oleh kerangka kebijakan manajemen pendidikan Islam (MPI) yang konvensional. Misalnya, penggunaan teknologi pembelajaran dan kolaborasi internasional memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun juga menuntut adanya kebijakan terkait privasi data, komersialisasi layanan pendidikan, dan penyesuaian nilai-nilai institucional bidang-bidang yang masih kurang memiliki pedoman etis yang jelas di banyak institusi Islam. Penelitian empiris yang dilakukan terhadap kepala madrasah dan pengelola pendidikan menunjukkan perlunya segera dibuat pedoman etika yang kontekstual dan mampu beradaptasi dengan tantangan global dan digital yang semakin kompleks. (Abdullah et al., 2025, hlm.62-65.) Tanpa adanya pedoman yang jelas serta responsif, MPI berisiko gagal dalam merumuskan konsistensi antara nilai-nilai Islam dengan tuntutan yang berlaku secara global. Next, meskipun kepemimpinan yang bermoral sering kali menjadi topik utama dalam partai Muhammadiyah, penelitian nasional menunjukkan bahwa banyak pemimpin di lembaga pendidikan Islam menghadapi permasalahan yang cukup rumit antara mempertahankan nilai-nilai yang benar dan tekanan dari instansi yang mengatur. (Septiani et al., 2024, hlm. 34-36.) Contohnya, dalam sebuah penelitian yang berjudul "Strengthening Tuition Governance Towards Transparency and Accountability at Ummul Quro Al-Islami Modern Boarding School Bogor" Mencatat bahwa meskipun ada aturan tentang pengelolaan uang sekolah, cara pengambilan keputusan dalam mendistribusikan dana menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan karena kurangnya pengawasan internal dan mekanisme audit yang mandiri.(Sari et al., 2024,hlm.45-48.) Situasi yang sama juga dibahas dalam artikel berjudul "Influence Islamic Leadership, Commitment Organization, Prevention Fraud Report Finance and Systems Information Accountancy to Quality Report Finance" Sistem pelaporan keuangan di beberapa lembaga Islam dapat menjadi rentan terhadap manipulasi jika pemimpin tidak konsisten dalam menerapkan nilai integritas.

Transparansi keuangan dalam lembaga pendidikan Islam seringkali masih bersifat parsial dan formalistik, bukan substansial. mengenai "Optimizing financial management and reporting to increase accountability and transparency in Islamic boarding schools" mengungkap bahwa walaupun laporan keuangan dibuat, keterbukaan kepada stakeholder (termasuk orang tua dan masyarakat) masih terbatas, dan mekanisme audit internal/eksternal yang independen belum selalu diterapkan. (Khalimah, Nur; Fitria, Ulfa; Jauhariyah, 2024, hlm.63-65.) Selain itu, studi "The Importance of Transparency in Scholarship Management: Addressing Public Trust Issues in Islamic Institutions" menemukan bahwa kurang jelasnya proses seleksi beasiswa dan laporan keuangan menyebabkan kepercayaan publik menurun, membuka peluang bagi praktik nepotisme atau penyalahgunaan dana donor.

Di era globalisasi dan digital, lembaga pendidikan Islam menghadapi tekanan untuk

mengadopsi standar mutu, pengelolaan teknologi, dan kerja sama internasional, yang kadangkala bertabrakan dengan nilai-nilai etika Islam tradisional. Artikel “Leadership in Islamic Education: Integrating Ethical Values in the Digital Age” menyebutkan bahwa penggunaan teknologi pendidikan membawa tantangan baru: bagaimana menjaga keadilan, privasi, dan integritas komunikasi digital sambil tetap memenuhi tuntutan inovasi dan efisiensi global. Keadilan dalam pengambilan keputusan juga menjadi isu, terutama dalam distribusi sumber daya, penerimaan siswa, dan kebijakan internal institusi, di mana keputusan yang adil seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti persaingan institusional, tekanan finansial, atau norma global yang kurang selaras dengan konteks lokal. Studi di pesantren dan sekolah Islam menunjukkan bahwa meskipun nilai keadilan sering disebut dalam visi dan misi, dalam praktik seleksi guru dan siswa, bantuan keuangan, dan beasiswa, masih ada ketidakmerataan yang terlihat. Meskipun buku-buku menyatakan pentingnya kepemimpinan yang baik dalam sistem pendidikan Islam (MPI), hasil riset menunjukkan adanya jarak antara harapan dan tindakan nyata. Karena pengawasan kurang efektif, ada kecenderungan pemimpin menggunakan wewenang mereka dengan tidak tepat. Penelitian tentang reformasi pendidikan Islam menunjukkan bahwa banyak lembaga terlalu mengandalkan kekuasaan pusat dan tidak memiliki budaya transparansi yang kuat. Hal ini memungkinkan keputusan yang lebih dipengaruhi oleh hubungan pribadi daripada prinsip keadilan dan integritas. Dengan kata lain, klaim bahwa kepemimpinan Islam itu baik sering kali hanya slogan, bukan tindakan nyata, karena masih kurangnya kemampuan manajemen dan pengawasan dari dalam dan luar lembaga. Kritik berikutnya mengenai aspek keuangan: meskipun banyak lembaga MPI sudah membuat laporan dan prosedur resmi, penelitian dan makalah dari kajian manajemen madrasah menunjukkan bahwa transparansi sering hanya formal—laporan tersedia, tetapi sulit diakses, diperiksa, atau disampaikan kepada masyarakat atau pihak terkait, sehingga akuntabilitas menjadi kurang baik (Nadir & Hamdi Abdul Karim, 2025, hlm. 4-6.). Hal ini menciptakan ruang untuk praktik nepotisme, pemberian sumber daya yang tidak adil, dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Masalah ini memerlukan perbaikan sistem pelaporan, audit yang mandiri, serta partisipasi aktif dari pihak terkait, bukan hanya sekadar prosedur administratif. Akhirnya, literatur kontemporer membahas dilema etis yang muncul ketika nilai-nilai normatif Islam harus berhadapan dengan tekanan dari globalisasi, seperti tuntutan akreditasi internasional, kerja sama global, dan digitalisasi pendidikan. Penelitian tentang peluang dan tantangan manajemen pendidikan Islam di era global menunjukkan bahwa penerapan praktik global tanpa mempertimbangkan konteks lokal dapat menyebabkan ketegangan nilai, seperti komodifikasi pendidikan, isu privasi data, atau tekanan pasar. Hal ini memaksa MPI untuk merumuskan pedoman etika operasional baru yang mampu menyelaraskan nilai lokal-Islami dengan standar global. Tanpa kerangka etika yang adaptif, lembaga Islam berisiko kehilangan legitimasi moral sekaligus kemampuan manajerial dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan modern.

Globalisasi pendidikan memberikan peluang besar bagi lembaga Islam untuk meningkatkan akses terhadap pengetahuan, memperkuat kerjasama di tingkat internasional, serta memperkaya materi pelajaran dengan menerapkan metode pendidikan dari negara lain. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa tekanan untuk mencapai

standar internasional sering kali menciptakan masalah etika, terutama dalam menjaga identitas Islam sebagai bagian dari lembaga tersebut. (Erihadiana et al., 2025, hlm. 242-244.) Dalam penelitian *Islamic Education Adaptation to Sociocultural Changes in the Globalization Era*, menemukan bahwa institusi pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga nilai-nilai lokal-Islam ketika menerapkan kurikulum dan metode pengajaran yang diimpor. Demikian pula, dalam artikel *Islamic Education and Globalization: Curriculum, Identity, and Digital Integration*, (Erni et al., 2024, hlm. 57-59.) menggambarkan bahwa reformasi kurikulum global dan integrasi digital memicu pertanyaan tentang apakah adaptasi tersebut selaras dengan nilai ke-Islaman atau justru berpotensi mengaburkan fundament etika yang menjadi dasar MPI. Digitalisasi membawa transformasi besar dalam cara belajar, mengajar, dan berinteraksi di lingkungan pendidikan Islam, termasuk penggunaan platform online, AI, augmented reality, dan pembelajaran jarak jauh. Namun, penelitian *Internalizing Digital Technology in Islamic Education* (Muslim, 2024, hlm. 185-187.) menunjukkan bahwa walaupun teknologi memperkaya pengalaman belajar dan memperluas akses, ada risiko seperti penurunan literasi keagamaan, kebergantungan terhadap media digital, dan melemahnya interaksi moral langsung di antara siswa dan guru. Studi lain, ini *Academic Ethics of Islamic Higher Education Institutions in the Digital Era* oleh (Sundowo et al., 2024. hlm.181-183.), menemukan bahwa institusi Islam tinggi merasa kesulitan menjaga standar akademik dan etika ketika kegiatan penelitian dan evaluasi semakin bergantung pada teknologi digital masalah seperti plagiarisme digital, verifikasi sumber, dan keaslian karya mahasiswa menjadi tantangan nyata.

Kompetisi antar lembaga pendidikan Islam untuk memperoleh reputasi, akreditasi internasional, dan menarik siswa dari berbagai latar belakang memicu dinamika tersendiri yang membawa dilema etika. Dalam studi *Optimizing Islamic Religious Colleges in Facing The Era of Globalization*, (Dian et al., 2023, hlm.329-331.) mencatat bahwa UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengadopsi program kelas internasional, peningkatan publikasi ilmiah, dan peningkatan kualitas SDM sebagai strategi agar mampu bersaing; namun, strategi-strategi tersebut menuntut sumber daya besar dan terkadang mengorbankan aspek kesetaraan—lembaga yang lebih kecil menghadapi kesulitan untuk mengikuti standar internasional tanpa dukungan finansial dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, artikel *Integrative Curriculum Innovation in Responding to Globalization* (Ahmad Mustafidin et al., 2025, hlm. 889-891.) mengungkap bahwa inovasi kurikulum di pesantren yang ingin memenuhi tuntutan pendidikan global sering mendapatkan kritik karena terlalu fokus pada aspek kompetitif, bukan pada pengembangan karakter atau keadilan social. Globalisasi pendidikan telah menciptakan peluang untuk kerja sama dan standar kualitas yang sama, namun beberapa penelitian menunjukkan adanya dilema etika ketika institusi Pendidikan termasuk lembaga pendidikan Islam menggunakan pendekatan pasar guna meningkatkan reputasi internasional serta pendapatan finansial. Fokus pada peringkat, akreditasi internasional, serta peningkatan jumlah mahasiswa asing sering kali mendorong praktik yang lebih mengutamakan keuntungan institusi dibandingkan keadilan akses atau kejuran akademik. Hal ini menyebabkan konflik antara tujuan pendidikan keagamaan dan tekanan ekonomi. Para ahli etika pendidikan menyarankan perlunya perubahan dalam

norma agar proses internasionalisasi pendidikan dapat berjalan seimbang dengan tanggung jawab sosial dan prinsip etika. (Alabdulhadi & Alkandari, 2024, hlm. 2-4.). Transformasi digital yang berlangsung cepat, seperti pembelajaran daring, penggunaan big data, dan alat kecerdasan buatan (AI), telah meningkatkan akses terhadap pendidikan, namun juga menimbulkan berbagai masalah etis yang nyata, seperti pelanggaran privasi data siswa, peningkatan risiko plagiarisme digital, serta ancaman terhadap kehumanisan dalam interaksi pendidikan. Penelitian empiris mengenai pembelajaran online selama dan setelah masa pandemi menunjukkan berbagai dilema praktis, seperti kesulitan dalam memverifikasi keaslian karya dan ketimpangan dalam kemampuan literasi digital, yang mencoba menguji kesiapan etis lembaga pendidikan. Selain itu, studi khusus mengenai penggunaan AI dalam pendidikan juga menyoroti adanya bias dalam algoritma dan kurangnya transparansi pada sistem penilaian otomatis, sehingga menuntut adanya kerangka etika teknologi yang jelas dan dapat ditegakkan. Oleh karena itu, proses digitalisasi tidak hanya memerlukan adopsi teknologi, tetapi juga pengembangan kode etik serta mekanisme pengawasan yang fleksibel dan adaptif.

Kompetisi antar lembaga untuk memenuhi standar internasional sering kali mendorong mereka untuk menghabiskan dana besar untuk fasilitas, program internasional, dan publikasi ilmiah. Strategi ini membantu meningkatkan reputasi lembaga, tetapi juga berisiko memperlebar perbedaan antara lembaga besar dan kecil. Selain itu, strategi ini cenderung menempatkan indikator kuantitatif sebagai prioritas utama, bukan keadilan sosial dan nilai-nilai institusional. Literatur manajemen pendidikan menekankan bahwa tekanan untuk mencapai kualitas global bisa memaksa lembaga melakukan kebijakan yang kurang etis, seperti mengalihkan sumber daya dari program pemberdayaan lokal ke program internasional. Hal ini bisa terjadi kecuali ada kebijakan redistribusi dan kode etik yang mengatur prioritas secara adil. Karena itu, perlunya pedoman etika dalam penggunaan teknologi dan kebijakan internasionalisasi yang berkeadilan adalah sangat mendesak. (Baigabylov et al., 2025, hlm. 3-5.). Meskipun telah dilakukan beberapa penelitian mengenai MPI dan berbagai isu etika, literatur terbaru menunjukkan bahwa banyak penelitian masih bersifat lokal dan memiliki cakupan geografis yang terbatas. Selain itu, penelitian tersebut juga kurang mampu menggambarkan dinamika global secara utuh dan terpadu. Misalnya, penelitian seperti *Islamic Education and Globalization: Curriculum, Identity, and Digital Integration* oleh (Erni et al., 2024, hlm. 42-44.) menggambarkan tren kurikulum dan integrasi digital, namun sedikit memfokuskan pada dilema etika spesifik yang muncul ketika standar global diterapkan pada konteks lokal yang berbeda-beda. Penelitian Quality Management Transformation of Islamic Religious Higher Education: A Literature Review juga memperlihatkan bahwa manajemen kualitas di pendidikan tinggi Islam terus berubah, tetapi belum secara mendalam memetakan problem etik dari kepemimpinan, transparansi, dan akuntabilitas dalam menghadapi tekanan internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan tinjauan literatur yang lengkap dan up-to-date untuk mengumpulkan serta menganalisis berbagai isu etika yang terdapat dalam literatur, mengidentifikasi celah-celah yang masih ada, serta menemukan isu-isu yang belum mendapat perhatian yang cukup.

Diskusi akademik terkini mengenai MPI dan etika menunjukkan perbedaan dalam pemahaman teori dan penerapan praktis antarnegara, serta perbedaan konteks sosial dan

budaya yang memengaruhi cara etika diterapkan di setiap wilayah. Sebagai contoh, artikel Issues and Management of Islamic Education in a Global Context oleh Menekankan bahwa meskipun lembaga Islam di Aceh dan Lampung menghadapi permasalahan yang sama dalam pengelolaan, perbedaan dalam regulasi pemerintah, infrastruktur, serta kebijakan lokal menyebabkan respons yang berbeda terhadap tantangan etis yang dihadapi. Demikian pula, studi tentang kompetensi dosen dan pengembangan nilai Islam dalam pendidikan tinggi di Indonesia dalam *Islamic Values in Lecturer Competency Development* menunjukkan bahwa konsep integritas, etika profesional, dan pedagogis di satu sisi sudah banyak dibahas, tapi belum banyak penelitian yang menganalisis implikasi globalnya, misalnya bagaimana norma-norma internasional dapat mengintervensi atau membentur nilai lokal yang Islami. Literatur review yang sistematis akan memungkinkan seperti ini: memetakan tema-tema dominan, metodologi yang populer, serta batasan-batasan teoretis dan empiris yang muncul di berbagai konteks global dan lokal.

Relevansi global dari MPI dalam bidang etika semakin penting karena pendidikan Islam kini tidak lagi hanya berlangsung di lingkungan lokal. Karena adanya kerja sama internasional, akreditasi yang berlaku di beberapa negara, perpindahan mahasiswa, serta perkembangan digital, institusi pendidikan Islam harus memperhatikan standar etika yang diakui secara internasional. Studi Islamic Education in Indonesia: Challenges and Opportunities in the Context of Multiculturalism oleh (Nugroho & Arqam, 2024, hlm. 10206-10208.). Mempertegas bahwa keberagaman budaya dan agama di sebuah negara seperti Indonesia membutuhkan penelitian etika yang tidak hanya berdasarkan aturan, tetapi juga mampu menggambarkan bagaimana lembaga Islam bisa menerima perbedaan dan memenuhi tuntutan internasional tanpa kehilangan identitasnya. Penelitian Literature Review on the Nature of Learners in the Philosophy of Islamic Education juga menekankan perlunya ulasan ulang terkait aspek kepribadian dan filosofi peserta didik di tengah era globalisasi: tidak hanya mengenai "apa yang diajarkan", tetapi juga bagaimana nilai-nilai etika berdasar norma Islam dapat dihayati dan diterapkan ketika siswa berhadapan dengan budaya global. Oleh karena itu, tinjauan literatur terkini akan membantu membuat kebijakan, pengelola lembaga, serta akademisi dalam memahami relevansi dan praktik terbaik dari berbagai konteks, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang memperhatikan konteks global sekali tetap menghargai nilai-nilai lokal berbasis Islam. Tinjauan bibliometrik serta pemetaan sistematis terbaru menunjukkan bahwa penelitian mengenai pendidikan Islam dan pengelolaannya mencakup berbagai topik seperti kualitas pembelajaran, kurikulum, tata kelola, dan teknologi. Namun, penelitian tersebut cenderung terpecah berdasarkan wilayah dan tema, sehingga mempersulit pembentukan gambaran yang utuh mengenai masalah etika yang muncul. Karena itu diperlukan systematic literature review yang menstrukturkan temuan misalnya mengelompokkan isu-isu integritas, transparansi, dan keadilan agar dapat dilihat pola umum, celah penelitian, dan interaksi antar-tema yang selama ini tersebar dalam studi kasus lokal maupun regional. Tanpa pemetaan tematik semacam itu, rekomendasi kebijakan mudah menjadi parsial dan kurang responsif terhadap fenomena lintas-batas. (Elihami et al., 2024 hlm.12-15)

Peristiwa-peristiwa terkini seperti pandemi dan peningkatan cepatnya digitalisasi telah mengubah fokus dalam praktik pendidikan Islam, termasuk penggunaan platform

daring, teknologi pendidikan (EdTech), dan pembelajaran campuran. Hal ini menyebabkan munculnya isu-isu etika baru, seperti perlindungan data pribadi, keaslian akademik, dan kesetaraan akses, yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam literatur lama. Beberapa tinjauan sistematis di bidang EdTech dan studi tantangan pendidikan Islam setelah pandemi menunjukkan bahwa diperlukan penggabungan antara bukti empiris dan analisis kebijakan untuk merancang kerangka etika teknologi yang sesuai dengan konteks Islam. Dengan kata lain, tinjauan literatur terbaru dapat menyusun bukti-bukti empiris setelah krisis dan menjelaskan bagaimana teknologi memengaruhi permasalahan etika dalam pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam kini secara aktif berkolaborasi dengan lembaga internasional, terdapat akreditasi lintas negara, serta mobilitas mahasiswa dan peneliti yang semakin meningkat, maka pendekatan yang hanya berdasarkan studi lokal tidak lagi cukup untuk menjawab pertanyaan mengenai relevansi global. Literatur yang membahas peran etika dan moral dalam konteks global menekankan perlunya tinjauan yang komparatif, yaitu mengidentifikasi perbedaan regulasi, praktik pengelolaan, dan respons etis di berbagai negara, sehingga dapat disusun rekomendasi kebijakan yang bersifat lintas negara namun tetap memperhatikan konteks setempat. Oleh karena itu, tinjauan pustaka yang sistematis dan komparatif akan menjadi fondasi yang kuat bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam merumuskan pedoman etika pendidikan Islam yang relevan secara global. Novelty Inovasi penelitian ini terdapat pada penelitian yang lebih luas dalam cakupan analisis dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya biasanya hanya fokus pada aspek normatif etika dalam pengelolaan pendidikan Islam, misalnya pentingnya integritas atau akuntabilitas berdasarkan pandangan syariah, atau hanya terbatas pada kasus lokal tanpa menghubungkannya dengan konteks global. Sebaliknya, penelitian ini fokus pada sintesis kritis melalui tinjauan pustaka yang tidak hanya menggambarkan isu etika secara konseptual dan praktis, tetapi juga menempatkan isu tersebut dalam konteks diskursus kontemporer seperti globalisasi pendidikan, digitalisasi, serta persaingan antar institusi di tingkat internasional. Oleh karena itu, perbedaan utamanya terletak pada penyajian kerangka yang komprehensif, yang menghubungkan isu etika lokal dengan dinamika global, sehingga mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan manajemen pendidikan Islam yang relevan, adaptif, dan kompetitif secara internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* (SLR) karena kemampuannya dalam menggabungkan bukti secara sistematis dan jelas untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait masalah etika, diskursus masa kini, dan pentingnya MPI secara global. *Systematic literature review* (SLR) memungkinkan pencarian yang menyeluruh, penyaringan yang bisa diulang, serta penggabungan topik dari berbagai bidang studi (Zaccagnini, 2023; Page et al., 2021, hlm. 12-13.). Selain itu, jika dalam proses penelitian ditemukan literatur yang banyak tetapi beragam, peneliti akan menggabungkan elemen scoping review untuk memperluas cakupan topik sesuai dengan panduan JBI (JBI Manual,2024 ch. 2,hlm.8-10). Strategi pencarian disusun menggunakan kata kunci kombinasi seperti "pendidikan Islam", "etika", "pemerintahan", "transparansi",

"digitalisasi", "globalisasi", serta sinonimnya dengan bantuan operator Boolean. Pencarian dilakukan di database internasional dan nasional yang terkenal, seperti Scopus, Web of Science, ERIC, DOAJ, serta repositori jurnal lokal dan regional untuk mendapatkan berbagai perspektif. Rentang tanggal publikasi dibatasi antara tahun 2021 hingga 2025 agar mendapatkan informasi perkembangan terkini. Kata kunci, filter, dan tanggal akses dicatat secara rinci agar hasil penelitian bisa diulang, sesuai dengan rekomendasi dan panduan JBI.(JBI Manual, 2024, ch.3, hlm. 15-18).

Kriteria inklusi mencakup artikel hasil penelitian (empiris atau konseptual) yang membahas topik terkait etika dan pengelolaan dalam pendidikan Islam, relevansi secara global, atau dampak dari digitalisasi serta kompetisi antar lembaga. Dokumen yang tidak berbentuk riset ilmiah, opini tanpa dasar data, serta publikasi yang diterbitkan di luar rentang waktu 2021 hingga 2025 tidak termasuk dalam kriteria inklusi. Proses seleksi dilakukan berdasarkan alur PRISMA 2020, yaitu identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi. Dalam proses ini, dua peneliti independen melakukan penyaringan terhadap judul dan abstrak, kemudian full text artikel. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam proses penyaringan, maka akan diselesaikan oleh ketiga peneliti untuk mengurangi potensi bias dalam seleksi (Page et al., 2021; Chien et al., 2023, hlm.2).

Artikel yang dipilih dianalisis dengan metode sintesis tema untuk menemukan konsep utama seperti integritas kepemimpinan, transparansi keuangan, dan dilema digital. Metode ini juga membantu dalam menyusun kerangka konseptual yang menghubungkan temuan dari lokasi penelitian dengan pembahasan umum di tingkat global. Proses analisis mengikuti langkah-langkah sistematis dari analisis tema, yaitu pengkodean awal, penggabungan kode menjadi tema, serta penjelasan tema yang berlaku lintas penelitian (Metsis, 2024; adaptasi gaya Braun & Clarke lihat juga pedoman analisis tema, 2023, hlm. 10-12). Untuk meningkatkan akurasi, peneliti menggunakan perangkat lunak manajemen kode seperti NVivo atau ATLAS.ti, serta tabel ringkasan bukti untuk setiap tema. Kualitas artikel yang dipilih dinilai dengan instrumen penilaian yang sesuai, seperti CASP untuk studi kualitatif dan checklist JBI untuk studi campuran atau kuantitatif. Selain itu, metode triangulasi sumber digunakan untuk memperkuat validitas dari temuan (Kolaski et al., 2023, hlm.7-9.). Semua langkah dalam metode penelitian—termasuk protokol pencarian, kriteria untuk memasukkan atau mengecualikan artikel, daftar artikel yang terpilih, serta diagram alur PRISMA—dijelaskan dan dilaporkan agar studi ini transparan dan bisa dilakukan kembali. Laporan akhir akan mengikuti pedoman PRISMA 2020 serta rekomendasi terbaik untuk tinjauan literatur sistematis dalam bidang pendidikan, sehingga temuan bisa berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan penelitian lanjutan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengkaji secara komprehensif isu-isu etika dalam Manajemen Pendidikan Islam melalui pendekatan literature review, dengan menyoroti tantangan yang muncul dalam praktik tata kelola, seperti integritas kepemimpinan, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas

Fenomena etika dalam Manajemen Pendidikan Islam (MPI) membutuhkan pemetaan yang menyeluruh karena isu-isu yang muncul bersifat multidimensi, meliputi

aspek nilai seperti integritas dan keadilan, prosedur seperti transparansi dan audit, serta konteks eksternal seperti globalisasi dan digitalisasi. Berdasarkan literatur terkini, analisis yang terpisah atau bersifat kasus lokal tanpa sintesis lintas konteks menyulitkan pembentukan rekomendasi kebijakan yang konsisten. Oleh karena itu, melakukan tinjauan literatur secara sistematis untuk mengidentifikasi tema utama serta kekurangan dalam penelitian menjadi langkah penting dalam memahami permasalahan etika di bidang MPI secara menyeluruh.

Dalam konteks kepemimpinan, terdapat perbedaan yang signifikan antara prinsip kepemimpinan Islami yang ideal (seperti keteladanan, amanah, dan keadilan) dengan praktik nyata di lembaga pendidikan Islam. Masalah seperti kurangnya kemampuan manajerial, penumpukan wewenang di satu pihak, serta lemahnya sistem pengawasan memungkinkan terjadinya praktik patronal dan pengambilan keputusan yang tidak etis. Berdasarkan literatur, dianjurkan untuk memperkuat model kepemimpinan yang menggabungkan pendidikan nilai (value-based leadership) dengan mekanisme kontrol internal dan eksternal, sehingga integritas dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Transparansi keuangan dan akuntabilitas sering muncul dalam penelitian sebagai masalah yang kurang baik di MPI: meskipun beberapa madrasah dan sekolah Islam sudah menerapkan prosedur pelaporan, akses masyarakat terhadap data keuangan, penerapan audit mandiri, serta partisipasi pihak terkait masih terbatas, sehingga berpotensi menyebabkan penyalahgunaan sumber daya. Penelitian tentang digitalisasi sistem keuangan madrasah menunjukkan kemungkinan meningkatkan transparansi jika disertai kebijakan pelaporan yang terbuka dan melibatkan banyak pihak; namun, jika digitalisasi tidak diiringi manajemen yang jelas, malah bisa menciptakan celah baru jika tidak ada audit dan pengawasan yang memadai. Keadilan dalam pengambilan keputusan, seperti penerimaan siswa, penyaluran beasiswa, perekrutan guru, serta alokasi dana, sering dipengaruhi oleh tekanan dari luar, seperti persaingan antar lembaga dan tuntutan akreditasi internasional. Banyak penulis menunjukkan adanya konflik etis ketika lembaga lebih fokus pada indikator kuantitatif (seperti peringkat dan publikasi) daripada tanggung jawab sosial dan kesetaraan akses; oleh karena itu, diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mengimbangi aspirasi kualitas internasional dengan prinsip keadilan dan tujuan sosial-keagamaan. Akuntabilitas keseluruhan MPI perlu dikuatkan melalui kombinasi: (a) mekanisme audit eksternal dan libatkan komite madrasah/komunitas untuk memastikan keterbukaan; (b) kode etik operasional termasuk kode etik digital yang mengatur privasi data, integritas akademik, dan penggunaan teknologi; serta (c) agenda riset komparatif lintas-negara yang menyediakan bukti untuk rekomendasi kebijakan. Literature review yang sistematis akan mengintegrasikan bukti-bukti ini, mengidentifikasi best practices, serta merumuskan model tata kelola etis yang kontekstual namun relevan pada level global.

Menganalisis Diskursus Kontemporer Yang Dipengaruhi Oleh Globalisasi, Digitalisasi, Dan Kompetisi Antar Lembaga

Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara diskusi tentang MPI, terutama terkait dengan peningkatan kualitas dan akreditasi internasional. Sekolah dan universitas Islam kini tidak hanya dinilai berdasarkan standar dalam negeri, tetapi juga

diharapkan mampu bersaing dengan institusi pendidikan yang berbasis global. Hal ini mendorong perubahan cara berpikir dalam pengelolaan lembaga pendidikan dari sekadar memenuhi kebutuhan lokal ke arah standar kualitas internasional. Menurut (Yusof dan Ariffin 2022, hlm. 203-205.), globalisasi dalam pendidikan mendorong lembaga Islam untuk menyesuaikan diri dengan prinsip pengelolaan modern agar tetap relevan di tingkat global. Namun, globalisasi juga membawa tantangan, terutama dalam menjaga identitas ilmu pengetahuan dan nilai-nilai etika Islam. Lembaga pendidikan Islam sering kali menghadapi dilema antara menjaga nilai-nilai agama yang normatif dengan menyesuaikan kurikulum dan sistem pengelolaan sesuai dengan tuntutan dunia internasional. Penelitian (Ahmad,2023,hlm. 107-109.) menunjukkan adanya konflik budaya ketika lembaga Islam harus menggabungkan sistem pengelolaan berbasis pasar dengan prinsip etika Islam, yang berpotensi melemahkan fokus pendidikan pada aspek spiritualnya.

Digitalisasi merupakan alat penting dalam proses perbaikan pengelolaan madrasah pengelolaan pendidikan Islam (MPI). Penggunaan sistem digital, seperti e-learning, manajemen akademik secara daring, dan pelaporan keuangan digital, dapat meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam operasional. Menurut (Hidayah dan Fauzi, 2024, hlm.98), digitalisasi di madrasah memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen, meskipun masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses digital dan kurangnya kemampuan teknologi di kalangan para pendidik. Di sisi lain, digitalisasi juga membawa munculnya berbagai masalah etika baru, seperti penggunaan data yang tidak semestinya, pelanggaran privasi, serta berkurangnya interaksi manusiawi dalam pembelajaran. (Suhendi 2024,hlm.240-242.) menekankan bahwa penerapan konsep Society 5.0 di lembaga pendidikan Islam harus diiringi dengan prinsip etika digital yang berbasis nilai-nilai Islam, agar teknologi tidak hanya menjadi alat untuk efisiensi, tetapi juga mampu mendukung tujuan pendidikan yang bersifat moral. Oleh karena itu, pembahasan mengenai digitalisasi dalam konteks MPI selalu berkaitan erat dengan penggabungan teknologi dan nilai-nilai etika yang relevan. Kompetisi antara lembaga pendidikan Islam semakin sengit, baik di tingkat lokal maupun internasional, sehingga mengarah pada kecenderungan mengejar pasar. menyatakan bahwa banyak lembaga pendidikan Islam terdorong untuk meningkatkan peringkat, akreditasi, dan citra internasional agar bisa menarik minat para siswa, meskipun dalam beberapa kasus mengorbankan aspek keadilan akses dan nilai-nilai etika internal. Kompetisi yang terlalu fokus pada keuntungan bisa menciptakan masalah etis dalam pengelolaan pendidikan.

Diskursus kontemporer manajemen pendidikan islam menunjukkan bahwa diperlukan upaya untuk menggabungkan nilai lokal (nilai Islam) dengan tantangan dari globalisasi, digitalisasi, dan persaingan. Penelitian menyatakan bahwa lembaga pendidikan Islam harus mengembangkan model yang campuran, yaitu sistem pengelolaan modern yang mampu merespons tuntutan global namun tetap mempertahankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan nilai Islam. Model ini memungkinkan pendidikan Islam ikut serta dalam pembangunan peradaban dunia tanpa kehilangan identitas spiritualnya. Dengan demikian, analisis literatur menunjukkan bahwa pembahasan tentang MPI di masa kini selalu berada di tengah-tengah beberapa hal: antara peluang yang datang dari globalisasi dan risiko kehilangan nilai-nilai, antara efisiensi yang diperoleh melalui

digitalisasi dan masalah etika yang muncul, serta antara persaingan di pasar dan tanggung jawab sosial. Studi literatur mengenai topik ini bisa menjadi panduan untuk menghadapi dilema etika, sekaligus memberikan kerangka konseptual dalam mengembangkan MPI yang bisa menyesuaikan diri, tetapi kompetitif, namun tidak kehilangan nilai-nilai Islam.

Menegaskan relevansinya dalam konteks global agar dapat memberikan pemetaan problem, memperkaya khazanah keilmuan, dan menawarkan perspektif kritis bagi pengembangan manajemen pendidikan Islam yang profesional, adaptif, serta bernilai Islami.

Manajemen Pendidikan Islam (MPI) memiliki relevansi global karena tantangan di bidang pendidikan modern tidak hanya terbatas pada wilayah lokal, tetapi juga melintasi batas negara. Peningkatan globalisasi dalam pendidikan, adanya akreditasi internasional, serta penstandarisasi kualitas menuntut lembaga pendidikan Islam untuk memiliki pengelolaan yang profesional. Menurut Yusof dan Ariffin, relevansi global MPI terletak pada kemampuannya menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pendekatan manajerial yang sesuai dengan standar internasional, sehingga tetap bersaing sekaligus mempertahankan identitasnya. Dalam konteks global, pemetaan masalah etika di MPI sangat penting untuk memahami titik-titik kritis seperti integritas kepemimpinan, akuntabilitas, dan keadilan sosial. (Ahmad,2023,hlm.101-115.) menekankan bahwa banyak masalah etis di MPI sebenarnya mirip dengan masalah manajemen pendidikan di dunia, seperti isu transparansi keuangan dan konflik kepentingan. Namun, MPI memiliki dimensi tambahan yaitu kewajiban untuk mempertahankan nilai-nilai normatif Islam. Hal ini menjadikan MPI sebagai tempat uji coba etika yang unik dalam sistem pendidikan global.

Literature review mengenai isu etika dalam Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dapat memperkaya ilmu pengetahuan dengan mengisi celah dalam penelitian, terutama dalam mengintegrasikan teori manajemen modern dengan prinsip etika Islam. (Alwi 2022, hlm. 55-70) menekankan pentingnya pengembangan kerangka konseptual yang bersifat hibrid, yang menghubungkan model tata kelola modern seperti akuntabilitas, efisiensi, dan mutu dengan prinsip normatif Islam seperti amanah, keadilan, dan maslahat. Dengan demikian, kontribusi MPI tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga teoretis dalam pengembangan ilmu manajemen pendidikan secara global. Selain itu, MPI juga memberikan perspektif kritis terhadap globalisasi pendidikan yang cenderung mengutamakan aspek pasar dan kompetisi dalam hal ranking. Ismet menemukan bahwa lembaga pendidikan Islam bisa menjadi penyeimbang dengan menekankan keadilan sosial, keberlanjutan moral, dan keadilan dalam akses pendidikan. Pandangan ini penting secara global karena menjadi pilihan alternatif dari sistem pendidikan kapitalistik yang sering mengabaikan nilai-nilai etika. Dalam masa kini yang serba digital, relevansi pendidikan Islam modern (MPI) tergantung pada kemampuannya untuk mengadopsi teknologi tanpa menghilangkan nilai-nilai etikanya. (Hidayah dan Fauzi 2024, hlm 45) menunjukkan bahwa proses digitalisasi manajemen madrasah bisa meningkatkan transparansi dan tanggung jawab, tetapi hanya akan efektif jika didasari oleh komitmen terhadap nilai-nilai etika Islam. Artinya, MPI tidak hanya mengadopsi teknologi dunia, tetapi juga mengubahnya sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga menjadi contoh yang bisa diikuti secara global.

Relevansi global dari Model Profesionalisme Islam (MPI) juga terlihat dari kemampuannya untuk memberikan contoh tentang profesionalisme yang berlandaskan nilai-nilai Islam. (Suhendi 2024, hlm 233-246) menekankan bahwa di tengah perkembangan era Society 5.0, pendidikan Islam dapat menunjukkan cara mengelola sistem pendidikan dengan memanfaatkan teknologi, namun tetap mempertahankan aspek spiritual dan etika. Model ini berperan dalam percakapan global tentang bagaimana pendidikan bisa tetap manusiawi dan etis di tengah proses digitalisasi yang semakin cepat. Dengan demikian, relevansi global MPI dapat ditegaskan melalui tiga aspek utama, yaitu: pemetaan masalah etika yang khas namun memiliki makna universal, kontribusi pemikiran konseptual dalam memperkaya pengetahuan ilmiah, serta perspektif kritis terhadap fenomena globalisasi dan digitalisasi. Hasil tinjauan pustaka ini bertindak sebagai dasar untuk mengembangkan model MPI yang profesional, fleksibel, dan sesuai dengan prinsip Islam, yang tidak hanya berguna bagi konteks lokal, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam percakapan pendidikan global yang sedang berusaha mencari keseimbangan antara efisiensi, keadilan, dan nilai-nilai etika.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang komprehensif, dapat disimpulkan bahwa isu etika dalam Manajemen Pendidikan Islam (MPI) merupakan persoalan multidimensi yang mencakup integritas kepemimpinan, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, yang semakin kompleks di tengah arus globalisasi dan digitalisasi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas nilai-nilai Islam dan realitas praktik manajerial di lapangan, di mana masih ditemukan bentuk penyalahgunaan wewenang, lemahnya mekanisme pengawasan, serta keterbatasan dalam penerapan tata kelola berbasis etika. Kajian literatur kontemporer mengungkap bahwa tantangan etis tersebut turut diperkuat oleh kompetisi antar lembaga dan tuntutan akreditasi internasional yang sering kali menimbulkan dilema moral serta tekanan terhadap nilai-nilai keislaman. Melalui pendekatan *systematic literature review*, penelitian ini menegaskan perlunya pemetaan ulang terhadap problem, diskursus keilmuan, dan relevansi global MPI agar dapat dirumuskan model tata kelola pendidikan Islam yang profesional, adaptif, dan bernilai Islami. Sintesis literatur juga memperlihatkan bahwa MPI memiliki potensi besar untuk menjadi model *ethical governance* alternatif dalam pendidikan global, dengan menyeimbangkan efisiensi modern dan nilai spiritualitas Islam. Oleh karena itu, reformasi etika dalam MPI tidak hanya penting bagi keberlanjutan lembaga pendidikan Islam, tetapi juga sebagai kontribusi nyata terhadap pengembangan paradigma pendidikan yang humanis, adil, dan berlandaskan moral universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, W., Syarifudin, E., Tarihoran, N., & Firdaos, R. (2025). Managerial accountability of madrasah principals and teacher performance of private Madrasah Aliyah in Banten Province. *Qalamuna*, 17(2), 887-898.
<https://doi.org/10.37680/qalamuna.v17i2.7202>

Ahmad Mustafidin, Aliwan, Moh Fahsin, Abdul Hakim, & M. Arief Hidayatullah. (2025).

- Integrative curriculum innovation in responding to globalization: A case study of Darul Amanah Islamic boarding school. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 473–483. <https://doi.org/10.51468/jpi.v7i1.887>
- Akhyar, Y. (2024). Public accountability in financial management practice at Islamic education institutions: A survey research. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(3), 4127–4142. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i3.4372>
- Alabdulhadi, M. M. J., & Alkandari, K. M. (2024). Practices of Islamic education teachers in promoting moderation (wasatiyyah) values among high school students in Kuwait: Challenges and obstacles. *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2365577>
- Anggini, K., & Khaudli, A. (2024). Ethical leadership transformation in Islamic education management in madrasahs. *Sports Culture*, 15(1), 72–86. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>
- Baigabylov, N., Mukhambetova, K., Baigusheva, K., Shebalina, O., Kudabekov, M., & Akpanov, A. (2025). Identifying risks in the digital transformation of higher education. *Journal of Turkish Science Education*, 22(1), 147–172. <https://doi.org/10.36681/tused.2025.009>
- Dian, D., Indayanti, A. N., Irfan Fanani, A., & Nurhayati, E. (2023). Optimizing Islamic religious colleges in facing the era of globalization. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 4(1), 58–77. <https://doi.org/10.31538/tijie.v4i1.326>
- Elihami, E., Mas'ud, M. I., Sicat, A. S., Ismail, I., Sitonda, S., & Sudirman, M. Y. (2024). Innovation in education with impact on development: Bibliometric analysis and mapping in 2024–2025 of Islamic education. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 6(1), 185–196. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v6i1.2131>
- Erihadiana, M., Rustandi, F., Munawaroh, C., & Roswan Pauzi, A. (2025). Islamic education adaptation to sociocultural changes in the globalization era. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 6(3), 396–408. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v6i3.6749>
- Erni, Artis, & Rahman. (2024). Zakat management practices and sustainable development in Indonesia. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(1), 24–37.
- Hajarana, S., Amal, M. A., & Faisal, M. F. (2025). Implementation of good corporate governance in madrasah cooperatives as a strategic management approach. *Business and Applied Management Journal*, 2(2), 100–111. <https://doi.org/10.61987/bamj.v2i2.508>
- Khalimah, N., Fitria, U., & Jauhariyah, N. A. (2024). The importance of transparency in scholarship management: Addressing public trust issues in Islamic institutions. *Ico Edusha*, 5(1), 57–69.
- Muslim, M. (2024). Internalising digital technology in Islamic education. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 6(3), 180–197. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v6i3.6309>
- Nadir, & Hamdi Abdul Karim. (2025). Accountability and transparency in education financing management. *ICMIE Proceedings*, 2(1), 256–263. <https://doi.org/10.30983/icmie.v2i1.64>

- Novia, A., & Siti Aimah. (2024). Revitalization of ethical leadership in Islamic education: Principal's strategy to face the challenges of globalization in madrasah. *Managere: Indonesian Journal of Educational Management*, 6(2), 140–152. <https://doi.org/10.52627/managere.v6i2.455>
- Nugroho, A. B., & Arqam, M. L. (2024). Islamic education in Indonesia: Challenges and opportunities in the context of multiculturalism. *Islam in World Perspectives*, 3(2), 134–146.
- Nurkhin, A., Rohman, A., & Prabowo, T. J. W. (2024). Accountability of pondok pesantren: A systematic literature review. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2332503>
- Sari, A. K., Amin, K., & Isnanimataka, M. I. (2024). Etika artificial intelligence (AI) dalam pendidikan Islam: Mengatasi tantangan distorsi dan misinterpretasi. *Proceeding International Conference on Tradition and Religious Studies*, 3(1), 350–359. <https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/lc-TiaRS/article/view/1211>
- Septiani, D., Nugraha, M. S., Efendi, & Ramadhani. (2024). Strengthening tuition governance towards Al-Islami modern boarding school Bogor. *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(2), 83–90.
- Sundowo, E., Asari, H., Anas, M. H., Lestari, A., & Lubis, S. (2024). Academic ethics of Islamic higher education institutions in the digital era. *EDUTEC: Journal of Education and Technology*, 8(1), 178–185. <https://doi.org/10.29062/edu.v8i1.915>
- Syahid, A., Kafrawi, K., Mulyadi, M., Ilyas, M., & Liriwati, F. Y. (2022). Islamic education governance towards independent learning. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 9(3), 354–364. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v9n3.2084>